MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 984/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026, tanggal 20 Juli 2026 tentang Pembentukan Komite Anggaran.

Hari : Rabu, 16 September 2026
Taktu : 10.00 WITA- selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Monev Penyerapan Anggaran, Pengelolaan BMN, dan Tata Kelola Perkantoran (Komite Anggaran)
Perserta Rapat : Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua PTUN Kupang, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasubbag, Panmud, dan Tim Terkait.
Jalannya rapat :

A. PEMBUKAAN

Pembukaan Rapat dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyampaikan salam dan terima kasih kepada jajaran pimpinan serta Tim Komite Anggaran yang hadir. Agenda utama rapat fokus pada evaluasi progres penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 hingga akhir Agustus 2026, tata kelola BMN (termasuk kendaraan dinas dan peranti TIK), serta penghematan daya/layanan operasional kantor, dan arahan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menyiapkan notulennya, dokumentasinya yang bertanggung jawab siapkan ruangan, nyalakan AC, dan daftar hadir.

I. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 (Posisi s.d. Akhir Agustus 2026)
   - DIPA 01 (Rutin/BUA): Penyerapan telah mencapai 81,11%.
   - DIPA 05 (Badilmiltun): Penyerapan telah mencapai 48,39%.
   - Arahan Ketua: Sisa alokasi anggaran terbesar di DIPA 05 adalah untuk kegiatan Sidang Keliling. Diinstruksikan agar pelaksanaan Sidang Keliling segera diagendakan dan diserap (target pelaksanaan sekitar tanggal 29 September sampai 2 Oktober 2026).
   - Anggaran Belanja Modal untuk tahun ini telah terealisasi seluruhnya. Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) diminta

melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait seluruh pertanggungjawaban kegiatan pengadaan.

2. Penghematan Energi Listrik dan Air (Mitigasi Operasional)
    - Tagihan listrik pemakaian Agustus (dibayar September) masih relatif tinggi sekitar Rp.3 juta-an.
    - Diperlukan langkah efisiensi/penghematan penggunaan listrik. Pengelola anggaran dan KPA diinstruksikan menyusun skenario mitigasi apabila alokasi dana listrik mengalami kekuangan menjelang akhir tahun.
    - Ditemukan masalah operasional terkait pompa air yang terus menyala namun aliran air tidak berjalan optimal ke atas. Bagian Kesekretariatan diinstruksikan untuk segera memeriksa dan mengevaluasi sistem otomasi pompa air.
3. Tata Kelola BMN, Penghapusan Aset, dan Persiapan Usulan Anggaran (Bottom-Up)
    - Penghapusan BMN: Proses penghapusan BMN elektronik dan barang rusak lainnya saat ini dalam tahap pembuatan akun lelang. Laporan progres wajib diselesaikan pada Triwulan III.
    - Penataan Status BMN & Kendaraan Dinas:
        - Ditegaskan bahwa penetapan status BMN (seperti laptop, komputer, dan kendaraan) mengikuti kebutuhan Kuasa Pengguna Barang (KPB)/KPA dan sistem SIMAN.
        - Kendaraan operasional/jabatan yang sudah berusia tua (lebih dari 10 tahun / rusak berat) diinstruksikan untuk segera diusulkan penghapusan.
        - Administrasi BMN wajib ditertibkan secara tertulis dan terdata di sistem agar pengajuan pengadaan/peremajaan aset baru ke tingkat pusat dapat disetujui.
4. Pengadaan Layanan Zoom Meeting via KKP
    - Pembayaran Zoom Meeting yang selama ini dilakukan bulanan dinilai menimbulkan beban administrasi dan berisiko menjadi tunggakan.
    - Diputuskan mulai tahun depan (dan seterusnya), langganan Zoom disetujui secara paket tahunan (1 tahun sekali) dengan mekanisme pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
5. Cross-Cutting Anggaran Perkantoran & Pelayanan Posbakum
    - Alokasi anggaran pemeliharaan gedung, komputer, serta peranti IT tetap berjalan seimbang antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan (khususnya untuk mendukung PTSP dan hukum perkara).
    - Terkait kelengkapan Posbakum dan transparansi publik: Banner, struktur organisasi Posbakum, dan jadwal piket yang masih berupa berkas di komputer diinstruksikan untuk segera dicetak dan dipasang menggunakan dukungan anggaran ATK/Posbakum yang tersedia.

B. Penutupan

Rapat Monitoring dan Evaluasi Komite Anggaran secara resmi ditutup oleh Ketua PTUN Kupang pada pukul 10.26 Wita.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
Onisimus Cascia Kembo	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H.
NIP. 200002162025211004	NIP. 197808172003121001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 984/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026, tanggal 20 Juli 2026 tentang Pembentukan Komite Anggaran.

Hari : Rabu, 16 September 2026
Taktu : 10.00 WITA- selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Monev Penyerapan Anggaran, Pengelolaan BMN, dan Tata Kelola Perkantoran (Komite Anggaran) Triwulan II
Perserta Rapat : Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua PTUN Kupang, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasubbag, Panmud, dan Tim Terkait.
Jalannya rapat :

A. PEMBUKAAN

Pembukaan Rapat dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyampaikan salam dan terima kasih kepada jajaran pimpinan serta Tim Komite Anggaran yang hadir. Agenda utama rapat fokus pada evaluasi progres penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 hingga akhir Agustus 2026, tata kelola BMN (termasuk kendaraan dinas dan peranti TIK), serta penghematan daya/layanan operasional kantor, dan arahan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk menyiapkan notulennya, dokumentasinya yang bertanggung jawab siapkan ruangan, nyalakan AC, dan daftar hadir.

I. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 (Posisi s.d. Akhir Agustus 2026)
   - DIPA 01 (Rutin/BUA): Penyerapan telah mencapai 81,11%.
   - DIPA 05 (Badilmiltun): Penyerapan telah mencapai 48,39%.
   - Arahan Ketua: Sisa alokasi anggaran terbesar di DIPA 05 adalah untuk kegiatan Sidang Keliling. Diinstruksikan agar pelaksanaan Sidang Keliling segera diagendakan dan diserap (target pelaksanaan sekitar tanggal 29 September sampai 2 Oktober 2026).
   - Anggaran Belanja Modal untuk tahun ini telah terealisasi seluruhnya. Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) diminta

sekitar Rp.3 juta-an diperlukan langkah efisiensi/penghematan penggunaan listrik. Pengelola anggaran dan KPA diinstruksikan menyusun skenario mitigasi apabila alokasi dana listrik mengalami kekuangan menjelang akhir tahun.

Tata Kelola BMN, Penghapusan Aset, dan Persiapan Usulan Anggaran (Bottom-Up) Proses penghapusan BMN elektronik dan barang rusak lainnya saat ini dalam tahap pembuatan akun lelang. Laporan progres wajib diselesaikan pada Triwulan III, Penataan Status BMN & Kendaraan Dinas Ditegaskan bahwa penetapan status BMN (seperti laptop, komputer, dan kendaraan) mengikuti kebutuhan Kuasa Pengguna Barang (KPB)/KPA dan sistem SIMAN, Kendaraan operasional/jabatan yang sudah berusia tua (lebih dari 10 tahun / rusak berat) diinstruksikan untuk segera diusulkan penghapusan, Administrasi BMN wajib ditertibkan secara tertulis dan terdata di sistem agar pengajuan pengadaan/peremajaan aset baru ke tingkat pusat dapat disetujui.

Pengadaan Layanan Zoom Meeting via KKP Pembayaran Zoom Meeting yang selama ini dilakukan bulanan dinilai menimbulkan beban administrasi dan berisiko menjadi tunggakan, Diputuskan mulai tahun depan (dan seterusnya), langganan Zoom disetujui secara paket tahunan (1 tahun sekali) dengan mekanisme pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Cross-Cutting Anggaran Perkantoran & Pelayanan Posbakum Alokasi anggaran pemeliharaan gedung, komputer, serta peranti IT tetap berjalan seimbang antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan (khususnya untuk mendukung PTSP dan hukum perkara) Terkait kelengkapan Posbakum dan transparansi publik: Banner, struktur organisasi Posbakum, dan jadwal piket yang masih berupa berkas di komputer diinstruksikan untuk segera dicetak dan dipasang menggunakan dukungan anggaran ATK/Posbakum yang tersedia.

II. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pembahasan dan monitoring yang telah dilakukan, adanya temuan pada Komite Anggaran yaitu Tim Komite Anggaran harus memastikan Penyerapan Anggaran untuk Sidang Keliling pada tanggal 29 September 2026 untuk Perkara Nomor 18/G/PTUN.KPG/2026 harus terealisasikan.

III. KESIMPULAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi Komite Anggaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menunjukkan bahwa Penyerapan Anggaran untuk Sidang Keliling pada tanggal 29 September 2026 untuk Perkara Nomor 18/G/PTUN.KPG/2026 harus terealisasikan.

Rapat ditutup pukul 10.30 WITA oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim
Notulis	
ONISIMUS CASCIA KEMBO	**Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.**
NIP. 200002162025211004	NIP. 197008242005022002